

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026



KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Pakusari. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pakusari. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Pakusari dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan Pakusari Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Pakusari.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian

dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakusari .

Jember, 15 November 2022

CAMAT PAKUSARI
Kabupaten Jember



R.SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19651031 199602 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Pakusari	15
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris Kecamatan Pakusari...	17
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	18
2.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporandan Keuangan	19
2.1.5 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan	21
2.1.6 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21
2.1.7 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	22
2.1.8 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum	24
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakusari	25
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari	27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	45
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	45
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	47
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	51
3.5 Penentuan isu-isu strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	26
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember	32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan.....	38
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	45
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	45
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	46
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	47
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan.....	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Pakusari Jember	57
Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Pakusari	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Pakusari menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakusari setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Pakusari juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakusari . Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun

Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Pakusari berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Pakusari terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Pakusari Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Pakusari harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 29. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam

- menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakusari Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pakusari dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pakusari untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
 7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan

tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pakusari .

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Pakusari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakusari
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pakusari
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakusari
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakusari

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PAKUSARI

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pakusari
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dalam lima tahun

mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Pakusari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pakusari dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakusari

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelurahan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Pakusari

Camat Pakusari sesuai Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas pokok :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat juga mempunyai fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;

- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat Pakusari

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Pakusari . Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
2. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi dan sub bagian secara terpadu

3. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangan
4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
5. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan analisis kebutuhan barang, analisis kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan.
8. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas.
9. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
10. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan pendistribusian surat;
 2. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 3. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 4. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
 5. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisa jabatan di lingkungan kecamatan;
 6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
 7. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
 8. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan aset milik daerah;
 9. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
 10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi OPD;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Daerah;
4. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
8. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
11. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
12. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

13. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
14. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
15. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan

Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
5. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
6. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;

2. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
5. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
9. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
10. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
11. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
12. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
13. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

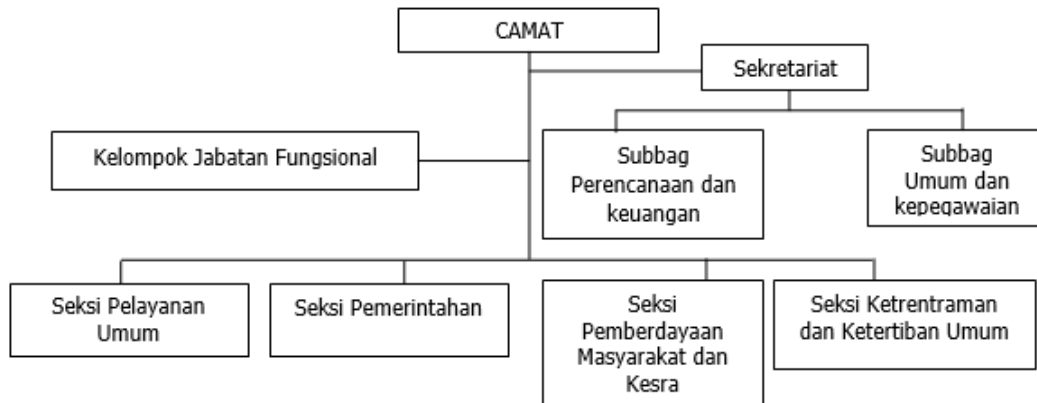
2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perizinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
3. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
4. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pakusari harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pakusari

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakusari

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Pakusari sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan 2 sub bagian, serta 4 seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebanyak 13 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 2 Orang
2. Eslon IV : 5 Orang
3. Staf/Non Eslon : 5 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakusari sebanyak 12 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 Orang
2. Sarjana S-1 : 5 Orang
3. Diploma -3 : - Orang
4. SLTA : 5 Orang
5. SLTP : - Orang
6. SD : - Orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pakusari

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Pakusari sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No .	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp. 000		Unit	Rp. 000	
1	Tanah	9	6.795.966.000,-		0	0	
2	Peralatan & Mesin	411	1.426.085.150		7	0	
3	Gedung & Bangunan	4	3,272,175,78 7.19		0	0	

No .	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp. 000		Unit	Rp. 000	
4	Jalan & Irigasi	39	2,282,478,020.81		0	0	
5	Aset Tetap Lainnya	2	950.400,-		0	0	
6	Aset Lainnya	180	70.700.000,-		0	0	
	Jumlah aset		13.848.355.358,00				

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakusari yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Pakusari telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan seksi-seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Pakusari dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tgt NSPK	Tgt IKK	Tgt Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur	V			%	100	100	100	100	100	100	100	96	97	98	100	100	96	97	98
Persentase aparatur yang berdisiplin	V			%	100	100	100	100	100	100	100	98	98	100	100	100	98	98	100
Persentase pejabat eselon yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	V			%	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	96	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	V			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan		V		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tgt NSPK	Tgt IKK	Tgt Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
perekonomian masyarakat																			
Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat		V		%	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100
Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemandirian lembaga masyarakat	V			%	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	96	100	100
Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan lembaga masyarakat	V			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan anggota lembaga masyarakat	V			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator kinerja yang rasio capaiannya tidak mencapai 100 %, antara lain :

1. Persentase Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur;
2. Persentase aparatur yang berdisiplin;
3. Persentase pejabat eselon yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
4. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan lembaga masyarakat.

Indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dan menjadi kendala. Faktor hambatan dari dalam yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam usaha meningkatkan motivasi aparatur dalam usaha mengembangkan potensi dan kinerja aparatur guna mendukung tugas dan fungsi yang dibebankan, seperti tidak adanya *reward and punishment* bagi setiap aparatur.

Faktor penghambat dari eksternal adalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan keterpurukan perekonomian negara, dan hal ini juga berimbas kepada masyarakat Kecamatan Pakusari . Pertumbuhan perekonomian yang lesu, sehingga menimbulkan dampak sosial di masyarakat seperti banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Sukowowono menjadi meningkat dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada lembaga masyarakat yang mandiri tidak meningkat, bahkan beberapa lembaga masyarakat mengalami keterpurukan.

Selain daripada itu, tabel 2.2. menunjukkan beberapa indikator yang dapat mencapai target, antara lain :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
2. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan lembaga masyarakat; dan
3. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan anggota lembaga masyarakat.

Pencapaian target ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung seperti, ketersediaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan, motivasi setiap anggota lembaga masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan baik individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan perekonomian lembaga masyarakat maupun anggotanya.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		147,194,000	166,330,000	149,990,000	417.124.536		142,568,567	155,700,200	146,842,450	214.394.833		0,97	0,94	0,98	0,54	21,48	-2,36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		108,300,000	40,150,000	46,090,000	91606.500		92,143,300	39,628,300	45,528,500	40.702.000		0,85	0,99	0,99	0,4	23,73	-17,57
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100.755.000	27.000.000	24.300.000	0		91.200.000	27.000.000	7.200.000	0		0,91	1	0,3	0	-61,07	-81,24
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		4,025,000			0		14,960,000			0		0	0	0	0	-100,00	0,00
Program Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama Masyarakat		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan		14,960,000					2,875,000										
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan		184,634,000	108,720,000	157,420,000			176,171,500	108,659,500	157,420,000								
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0	0	0		0	0	0	81.531500		0	0	0	0	+100,00	0,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		0	0	0	0		0	0	0	6.000.000		0	0	0	0	+100,00	0,00
Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		0	0	0	0		0	0	0	18.367.500		0	0	0	0	+100,00	0,00

Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	0	0	0		0	0	0	524.808.500		0	0	0	0	+100,00	0,00
Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		0	0	0	0		0	0	0	271.810.000		0	0	0	0	+100,00	0,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		0	0	0	0		0	0	0	13.500.000		0	0	0	0	+100,00	0,00

Tabel 2.3. menunjukkan bagaimana kekuatan anggaran dan realisasi yang dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021. Penyediaan anggaran pada periode RPJMD sebelumnya terlihat mengalami penurunan hingga 10% setiap tahunnya, sehingga program dan kegiatan di Kecamatan Pakusari yang dapat dilaksanakan hanya sebatas program dan kegiatan rutin serta koordinasi tingkat kecamatan tanpa adanya program prioritas dalam rangka pembangunan di wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan pada Periode RPJMD tahun 2016 hingga tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jember lebih fokus pada penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan bidang kesehatan, dimana anggarannya difokuskan pada organisasi perangkat daerah teknis yang mengurus urusan dimaksud, dan kecamatan berfungsi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis dimaksud.

Pada sisi realisasi anggaran, terlihat bahwa setiap tahunnya realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pakusari meningkat. Dari awal tahun 2016 hanya mencapai 87,45% menjadi 94,65% di Tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa meskipun dengan anggaran terbatas, Kecamatan Pakusari mampu melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan baik.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Pakusari dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Pakusari dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal

a. Kekuatam

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Ketersediaan anggaran setiap tahunnya dari APBD yang dapat membantu dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Pakusari .

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Pakusari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Masih rendahnya tingkat disiplin, daya saing serta tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Pakusari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja kecamatan masih belum cukup optimal.
- 3) Kurang tegasnya penerapan *reward and punishment* pada sumber daya aparatur Kecamatan Pakusari membuat motivasi untuk berkinerja yang optimal pada kecamatan masih rendah.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten melalui program dan kegiatan prioritas dengan sasaran di Kecamatan Pakusari .
- 2) Peran serta pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat wilayah.
- 3) Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan kewilayahan di Kecamatan Pakusari baik melalui perencanaan partisipatif maupun pengawasan kegiatan pembangunan.

b. Tantangan

- 1) Penyediaan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat pada berbagai sektor dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima.
- 2) Pengembangan berbagai inovasi publik khususnya yang bersifat digital guna mengikuti perkembangan jaman serta mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 3) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui berbagai peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan.
- 4) Penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat wilayah guna mendukung iklim investasi yang baik serta berwawasan lingkungan.
- 5) Perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah kecamatan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, ekonomi yang kuat, dan berdaya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pakusari memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Camat Pakusari Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Camat Pakusari Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelaksana teknis kewilayahan di Kecamatan Pakusari . Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakusari . Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pakusari

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“SUDAH SAATNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE
MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM
MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- Wis wayahe mbenahi Jember

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat

tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan

keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakusari terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	<p>a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Pakusari .</p> <p>b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.</p> <p>c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah,</p> <p>b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Pakusari yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.</p> <p>c. Pemahaman masyarakat Pakusari dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat Sukowono akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Sukowono dalam kepengurusannya sendiri.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Pakusari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan dan sebagian urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pakusari yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakusari ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Dukungan penertiban penggunaan lokasi terminal Pakusari di luar fungsinya dalam rangka mendukung pengaktifan kembali Terminal Pakusari sebagai Terminal Tipe B	Lokasi terminal Pakusari eksisting yang terletak di dekat pusat pemerintahan dan perniagaan Kecamatan Pakusari, sehingga meningkatkan aksesibilitas terminal tersebut.	Kondisi lokasi terminal Pakusari yang saat ini dimanfaatkan untuk perniagaan dan perdagangan tanpa ada arahan penataan terminal, dikarenakan kondisi terminal yang telah lama tidak aktif.
2.	Penetapan Kecamatan Pakusari sebagai Wisata Budaya dan Buatan Manusia.	Potensi pendukung wisata baik wisata budaya maupun wisata buatan manusia yang ada dan hanya perlu perbaikan dan pengembangan.	Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3.	Penetapan Kecamatan Pakusari sebagai Sentra Produksi Pertanian, , serta Peternakan dan sumber daya Alam	Potensi produksi pertanian, dan peternakan dan Sumberdaya Alam yang cukup besar	Tata Kelola produksi pertanian yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian, Sumber Daya Alam, peternakan sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 – 2035, Kecamatan Pakusari, didalam pola ruang, termasuk ke dalam sistem pedesaan Kota yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

1. Pemerintahan kecamatan;
3. Pusat pemerintahan desa;
4. Pusat pemukiman desa;
5. Pertanian;
6. Agropolitan;
7. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
8. Pendukung aktifitas Perusahaan Gudang Tembakau swasta.

Untuk terkait pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum, di Kecamatan Pakusari terdapat pengembangan Terminal Tipe B, yaitu Terminal Pakusari, dan peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan yang melalui rute Pakusari – Antirogo – Arjasa, sehingga diharapkan pengembangan sarana prasarana angkutan umum di Kecamatan Pakusari nantinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Pakusari.

Selain daripada itu, Kecamatan Pakusari juga merupakan bagian dari pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air

melalui pengembangan embung dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

Terkait dengan sistem jaringan prasarana lingkungan, Kecamatan Pakusari termasuk dalam pengembangan prasarana pengelolaan sampah yang meliputi :

1. Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan prinsip 4R yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti kembali yang meliputi :
 - a. Kecamatan Pakusari pemrosesan akhir (TPA), salah satunya diletakkan di Kecamatan Pakusari ;
 - b. Tempat penampungan sementara (TPS);
 - c. Tempat pengelolaan sampah skala Perusahaan yang ada di TPA Pakusari.
2. TPA berupa optimalisasi TPA, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA.
3. Rencana lokasi TPS meliputi pengurangan sampah di lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dan pengembangan pemilahan awal sampah pada masing-masing pusat pelayanan lingkungan.

Terkait dengan mitigasi bencana, Kecamatan Pakusari termasuk dalam daerah rawan bencana Puting Beliung sehingga perlu dikembangkan jalur evakuasi bencana Puting Beliung yang melalui jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan Kabupaten. Sedangkandengan Pariwisata Buatan Dipakusari telah ada Wisata Out door Seger Nusantara, Wisata Panjat Tebing Sepikul.

Dalam pengembangan kawasan peruntukan pertanian, Kecamatan Pakusari termasuk dalam pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, dan hortikultura. Untuk pengembangan jenis produksi pertanian yang dikembangkan antara lain :

1. Sentra Padi;
2. Sentra Jagung;
3. Sentra Penghasil tembakau kasturi;
4. Sentra Buah Durian(Pasar Buah durian Desa Pakusari);
5. Sentra Cabe Rawit.

Sedangkan, untuk kawasan Sumber daya alam, Kecamatan Pakusari termasuk dalam Penghasil Batu Pecah bangunan, Batu Piring kualitas Ekport yang ada di desa Bedadung dan penyuplai tanah uruk, batu koral, pasir untuk bahan bangunan untuk daerah Jember Kota.

Mendasari uraian tersebut di atas, potensi Kecamatan Pakusari cukup besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Potensi yang besar ini tidak akan dapat mendukung untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 jika tidak ada aksi yang nyata dalam mengolah potensi-potensi yang ada menjadi kekuatan Pemerintah Kecamatan Pakusari dalam mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Jember dalam bentuk sinergitas dan kolaboratif program kegiatan

pembangunan. Selain daripada itu, pada Tabel 3.5. juga disampaikan bahwa ada faktor-faktor penghambat yang harus secara bersama-sama dikalahkan atau dihilangkan guna kelancaran pencapaian visi misi Kabupaten Jember dalam lima tahun yang akan datang.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pakusari ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan TPB di Kecamatan Pakusari dapat berjalan dengan lancar	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujudkan.

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah Pilar hukum dan tata kelola dimana yang menjadi isu strategisnya adalah tata kelola pemerintahan terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparaturnya pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Pakusari adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan

potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;

6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Pakusari ;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

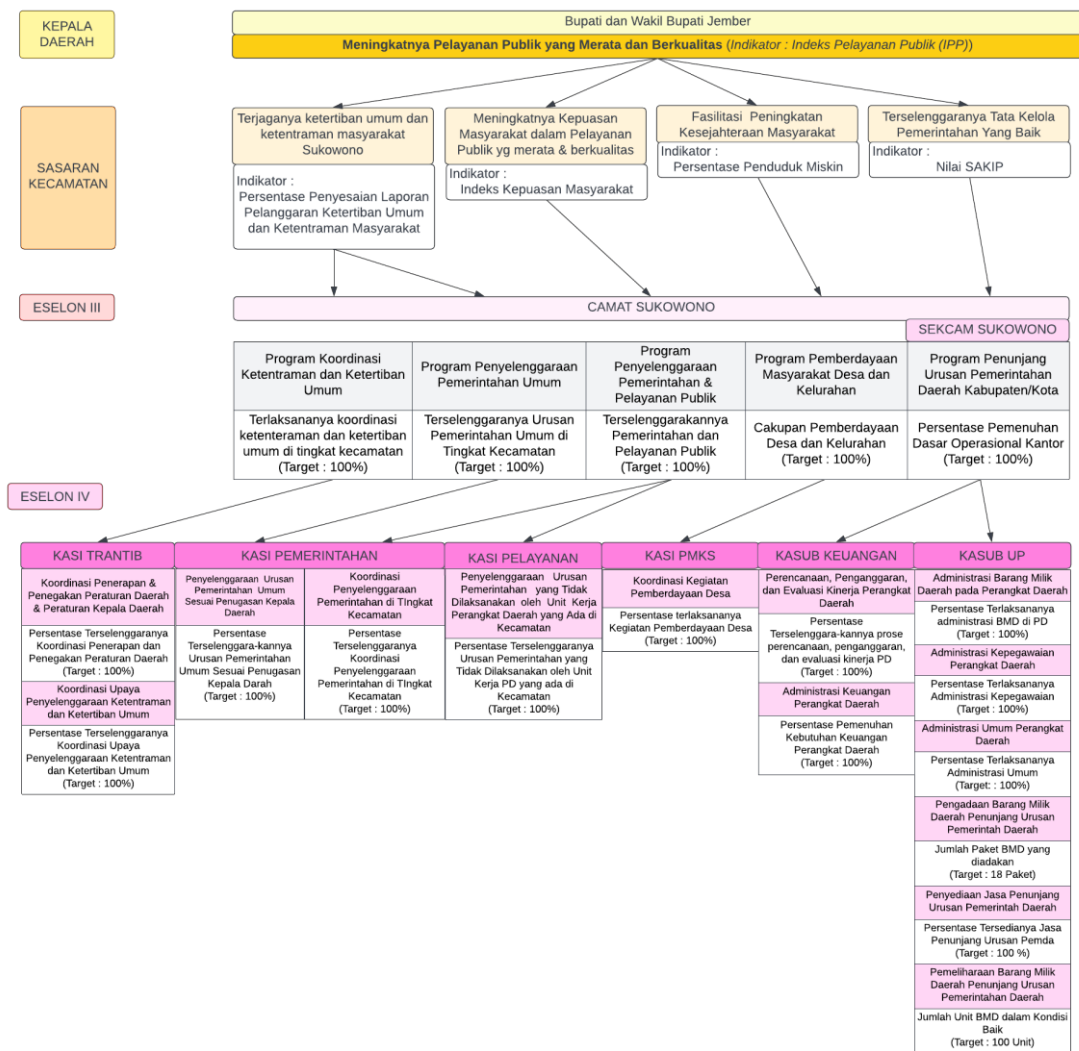
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER. dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Pakusari termasuk dalam Misi ke-2 yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakusari dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan								
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,00				
1.A			SKM Aparatur	80				
			Nilai SAKIP	CC				

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.B	Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	40%				
1.C		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	8,33%				
Setelah Perubahan								
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan		Indeks Pelayanan Publik		3,50	4,00	4,50	5,00
1.A		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pakusari	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ktertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat		100%	100%	100%	100%
1.B		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Sukowo-no	IKM		85	90	95	100
1.C		Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pakusari	Persentase Penduduk Miskin		1,50%	1,00%	0,50%	0,00%
1.D		Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Sukowono yang Baik	Nilai SAKIP		B	BB	A	A



Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

RPJMD Kab. Jember 2021-2026	<p>VISI : SUDAH WAKTUNYA MEMBENAI JEMBER (WES WAYAHE MBENAI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER</p>							
	<p>MISI 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya</p>							
	<p>Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik</p>							
	<p>Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas.</p>							
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukowono	<p>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan. (Indikator : Indeks Pelayanan Publik; Target : 5,00)</p>							
	<p>Sasaran 1 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Sukowono</p>		<p>Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yg merata & berkualitas</p>		<p>Sasaran 3 : Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</p>		
	<p>Indikator : Persentase Penyelesaian Laporan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Target : 100%)</p>		<p>Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Target : 100)</p>		<p>Indikator : Persentase Penduduk Miskin (Target : 0%)</p>	<p>Indikator : Nilai SAKIP (Target : A)</p>		
	<p>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>		<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p>		<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik</p>	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	
Program dan Indikator Program	<p>Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan (Target : 100%)</p>		<p>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)</p>		<p>Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Target : 100%)</p>	<p>Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (Target : 100%)</p>	<p>Persentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor (Target : 100%)</p>	
	<p>Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah</p>		<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Kepala Daerah</p>		<p>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>
	<p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Kepala Daerah (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p>Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa (Target : 100%)</p>	<p>Persentase Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (Target : 100%)</p>	<p>Persentase Terlaksananya administrasi BMD di PD (Target : 100%)</p>
	<p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Target : 100%)</p>
Kegiatan dan Indikator Kegiatan	<p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah (Target : 100%)</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum (Target : 100%)</p>
	<p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah (Target : 100%)</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum (Target : 100%)</p>
	<p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah (Target : 100%)</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum (Target : 100%)</p>
	<p>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>		<p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah (Target : 100%)</p>	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum (Target : 100%)</p>

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pakusari selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Kecamatan Pakusari memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Visi : SUDAH WAKTUNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER			
Misi II : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah			
Sebelum Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pember-dayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/se-mangat dan disiplin kerja. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.
		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pemerintah Keamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

Sesudah Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pakusari . 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Pakusari 3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pakusari 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Pakusari Yang Baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda dan Per-bup atau peraturan perundangan lain-nya. 2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. 3. Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa 4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis. 2. Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan purna layan dengan baik. 3. Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya. 4. Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tusi masing-masing ASN serta pembiayaan di bidang kepegawaian secara berkala

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Pakusari tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Sebelum Perubahan																				
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat																				
				Indeks Pelayanan Publik		2,50	3,00	3.020.472.547	3,50	3.431.238.000	4,00	3.431.238.000	4,50	4.151.800.000	5,00	4.151.800.000	5,00	18.628.490.000		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur			SKM Aparatur		76	80	3.020.472.547	85	3.431.238.000	90	3.431.238.000	95	4.151.800.000	100	4.151.800.000	100	18.628.490.000		
				Nilai SAKIP		C	CC		B		BB		A		A		A			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%	100	100	3.020.472.547	100	3.431.238.000	100	3.774.362.000	100	4.151.800.000	100	4.151.800.000	100	18.628.490.000		
		7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%	100	100	6.500.000	100	7.500.000	100	8.500.000	100	9.500.000	100	610.712.000	100	2.740.172.000	Sekretariat	Kantor Kecamatan
		7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	%	100	100	1.805.569.247	100	1.986.126,172	100	2.005.987,433	100	2.206.586,177	100	2.427.244,794	100	10.431,513,823,31	Sekretariat	Kantor Kecamatan
		7	01	01	2.06		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	86.555.300	100	95,210,830	100	96,162,938	100	105,779,232	100	116,357,155	100	500,065,455,77	Sekretariat	Kantor Kecamatan

		7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Prosentasi pelayanan umum semakin baik			127,810,000	100	140,591,000	100	141,996,910	100	156,196,601	100	171,816,261	100	738,411,172.10	Seksi pelum	Kantor Kecamatan
		7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik	%	100	57,058,000	100	62,763,800	100	63,391,438	100	69,730,582	100	76,703,640	100	329,647,859.78	Sekretariat	Kantor Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan baik	%	100		29,860,000	100	32,846,000	100	33,174,460	100	36,491,906	100	40,141,097	100	172,513,862.60			
							Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya dengan Baik	%	100	100	6,646,000	100	7,310,600	100	7,383,706	100	8,122,077	100	8,934,284	100	282.124.000			
							Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil jabatan baik				20,552,000	100	22,607,200	100	22,833,272	100	25,116,599	100	27,628,259	100	118,737,730.32			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	486,830,000	100	535,513,000	100	540,868,130	100	594,954,943	100	654,450,437	100	2,812,616,910.30		Kecamatan Pakusari
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa	%	100	100	480,150,000	100	528,165,000	100	533,446,650	100	586,791,315	100	645,470,447	100	2,774,023,811.50	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pakusari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							dengan baik																	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Terselenggarakannya Urusan Pemerintahan																	
		7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum	%	100	100	6,680,000	100	7,348,000	100	7,421,480	100	8,163,628	100	8,979,991	100	38,593,498.80	Seksi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Pakusari	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target					Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	100	100	133,066,000	100	146,372,600	100	147,836,326	100	162,619,959	100	178,881,954	100	768,777,239.06		
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Terlaksananya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaksananya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik	%	100	100	133,066,000	100	146,372,600	100	147,836,326	100	162,619,959	100	178,881,954	100	715,393,970.66	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pakusari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	04			Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban	Terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	31.482.000	100	31.482.000	100	31.482.000	100	31.482.000	100	31.482.000	100	157.410.000	Seksi Trantib	Kecamatan Pakusari
		7	01	04		2.02		Prosentase Terlaksananya Terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	317,084,000	100	348,792,400	100	352,280,324	100	387,508,356	100	426,259,192	100	1,831,924,672,44	Seksi Trantib	Kecamatan Pakusari

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Sesudah Perubahan																					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan																					
				Indeks Pelayanan Publik		2,50			3,50	4.724.663.000	4,00	4.976.914.000	4,50	5.163.154.000	5,00	5.318.503.000	5,00	20.183.234.000			
	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Pakusari Yang Baik			Nilai SAKIP Kec. Pakusari		C			B	3.110.580.000	BB	3.140.914.000	A	3.216.654.000	A	3.421.503.000	A	12.889.651.000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%	100	100	3,020,472,547	100	3,322,519,802	100	3,355,745,000	100	3,691,319,500	100	4,060,451,450	100	17,450,508,698		
		7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	%	100	100	6.500.000	100	7.500.000	100	8.500.000	100	9.500.000	100	610.712.000	100	2.740.172.000	Sekretariat	Kantor Kecamatan
		7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	%	100	100	1.805.569.247	100	1,986,126,172	100	2,005,987,433	100	2,206,586,177	100	2,427,244,794	100	10,431,513,823.31	Sekretariat	Kantor Kecamatan
		7	01	01	2.06		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	86.555.300	100	95,210,830	100	96,162,938	100	105,779,232	100	116,357,155	100	500,065,455.77	Sekretariat	Kantor Kecamatan

		7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Prosentasi pelayanan umum semakin baik	%	100	100	130,810,000	100	143,891,000	100	145,329,910	100	159,862,901	100	175,849,191	100	755,743,402	Seksi pelum	Kantor Kecamatan
		7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik	%	100		58,618,000	100	64,479,800	100	65,124,598	100	71,637,058	100	78,800,764	100	338,660,619	Sekretariat	Kantor Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan baik	%	100		29,860,000	100	32,846,000	100	33,174,460	100	36,491,906	100	40,141,097	100	172,513,862.60			
							Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya dengan Baik	%	100	100	8,206,000	100	9,026,600	100	9,116,866	100	10,028,553	100	11,031,408	100	47,409,826			
							Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil jabatan baik				20,552,000	100	22,607,200	100	22,833,272	100	25,116,599	100	27,628,259	100	118,737,730.32			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100	100	486,830,000	100	535,513,000	100	540,868,130	100	594,954,943	100	654,450,437	100	2,812,616,910.30		Kecamatan Pakusari
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa	%	100	100	480,150,000	100	528,165,000	100	533,446,650	100	586,791,315	100	645,470,447	100	2,774,023,811.50	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pakusari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							dengan baik																	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Terselenggarakannya Urusan Pemerintahan																	
		7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum	%	100	100	6,680,000	100	7,348,000	100	7,421,480	100	8,163,628	100	8,979,991	100	38,593,498.80	Seksi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Pakusari	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target					Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	100	100	130,766,000	100	143,842,600	100	145,281,026	100	159,809,129	100	175,790,041	100	755,489,196		
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Terlaksananya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaksananya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik	%	100	100	130,766,000	100	143,842,600	100	145,281,026	100	159,809,129	100	175,790,041	100	755,489,196	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pakusari

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target					Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		7	01	04			Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban	Terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	31.482.000	100	31.482.000	100	31.482.000	100	31.482.000	100	31.482.000	100	157.410.000	Seksi Trantib	Kecamatan Pakusari
		7	01	04		2.02		Prosentase Terlaksananya Terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	317,084,000	100	348,792,400	100	352,280,324	100	387,508,356	100	426,259,192	100	1,831,924,672,44	Seksi Trantib	Kecamatan Pakusari

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sebelum Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	72	74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SKM Aparatur	95	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi	50	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase Desa Mandiri pada Kec Pakusari	8,33	16,67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Setelah Perubahan								
1	Indeks Pelayanan Publik	2,50	N/A	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	50,00	N/A	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Kertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100	N/A	100	100	100	100	100
4	Persentase Penduduk Miskin	2,67	N/A	1,50	1,00	0,50	0,00	0,00
5	Nilai SAKIP	C	N/A	B	BB	A	A	A
6	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100	N/A	100	100	100	100	100
7	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100
8	Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100	N/A	100	100	100	100	100
9	Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	100		100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

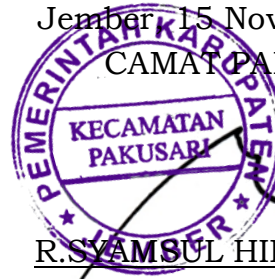
Rencana Strategis Kecamatan Pakusari ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakusari Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan

Kecamatan Pakusari sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 15 November 2022

CAMAT PAKUSARI



R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19651031 199602 1 002